



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Nomor : B-15/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020
Sifat : Segera
Hal : *Penyampaian Surat Edaran
dan Persiapan Pelaksanaannya*

7 Mei 2020

Yth. 1. Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi
2. Bupati/Walikota selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Kabupaten/Kota

di –
Tempat

Sehubungan dengan ditetapkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana terlampir, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran dimaksud, agar Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah, untuk dapat segera membentuk tim gabungan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum;
2. Tim Gabungan tersebut berasal dari unsur pemerintah daerah dan pusat yang terdiri dari BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Satuan Kewilayahan TNI dan Polri, serta instansi strategis lainnya.
3. Guna efektifnya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum maka perlu diberdayakan satgas gabungan yang sudah berjalan saat ini yaitu :
 - a. Untuk angkutan darat, Dansatgas dari kepolisian dibantu TNI, tim kesehatan daerah (Dinas Kesehatan), LLAJ/Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, unsur dari Ditjen Perhubungan Darat (Balai Pengelola Transportasi Darat/BPTD).
 - b. Untuk angkutan Laut, Dansatgas dari Danlantamal/Danlanal/TNI AL dibantu tim kesehatan (KKP dan Dinas Kesehatan), Unsur Ditjen Perhubungan Laut (Kepala Otoritas Pelabuhan atau Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan), Dinas Perhubungan, Polri, Syahbandar.
 - c. Untuk angkutan Udara, Dansatgas dari Danlanud/TNI AU di wilayah, Kabandara (Angkasa Pura I dan II), Unsur Ditjen Perhubungan Udara (Kepala Otoritas Bandara dan Kepala UPBU), Kantor Kesehatan Pelabuhan/KKP, Polri
 - d. Angkutan Kereta Api, Dansatgas TNI AD/Polri, Unsur Ditjen Perkeretaapian, PT KAI dan Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan.

Demikian disampaikan, agar surat edaran ini dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Sebagai Ketua Gugus Tugas,



Monardo

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang PMK;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Perhubungan;
6. Panglima TNI;
7. Kapolri.



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG

KRITERIA PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia tentang pelarangan mudik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan guna melengkapi pengaturan tentang PSBB serta pengaturan tentang pengendalian transportasi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu ditetapkan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. Memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat;
2. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional selama darurat bencana nonalam COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Kriteria Pembatasan perjalanan orang keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif dengan kendaraan pribadi atau sarana transportasi umum (darat, kereta api, penyeberangan, laut, dan udara) di seluruh Indonesia;

1. Kriteria Pengecualian

a. Perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan:

- 1) Pelayanan percepatan penanganan COVID-19;
- 2) Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum;
- 3) Pelayanan kesehatan;
- 4) Pelayanan kebutuhan dasar;
- 5) Pelayanan pendukung layanan dasar;
- 6) Pelayanan fungsi ekonomi penting;

- b. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia;
 - c. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Persyaratan Pengecualian
- a. Persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta:
 - 1) Menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2;
 - 2) Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/organisasi nonpemerintah/Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;
 - 3) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;
 - 4) Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
 - 5) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 6) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan);
 - b. Persyaratan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia:
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) Menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain;
 - 3) Menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat almarhum/almahumamah (untuk kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia);
 - 4) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan *PCR Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;
 - c. Persyaratan Repatriasi Pekerja Migran Indonesia, Warga Negara Indonesia dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah:
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal);
 - 2) Menunjukkan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) atau surat keterangan dari perwakilan RI di luar negeri (untuk penumpang dari luar negeri);

- 3) Menunjukkan surat keterangan dari Universitas atau Sekolah (untuk Mahasiswa dan Pelajar);
- 4) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR *Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;
- 5) Proses pemulangan harus dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan universitas.

D. Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum

1. Pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur otoritas penyelenggara sarana transportasi umum.
2. Pembentukan pos penjagaan dan pemeriksaan di setiap akses keluar masuk batas negara, batas wilayah administratif, jalan tol, jalan nasional, terminal, stasiun, pelabuhan laut dan bandar udara yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Setiap kegiatan perjalanan orang yang diatur dalam Surat Edaran ini wajib dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan protokol transportasi yang berlaku.
4. Setiap pelanggaran akan ditindak dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2020

KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19),



DON MONARDO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
2. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi; dan
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten/Kota.